



PEMERINTAH KABUPATEN BONE



RENCANA KERJA 2025

DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja ini, selain sebagai pembuktian akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi daerah yang ditetapkan pada awal masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur, akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik, sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Penyusun dan Pengarah Rencana Kerja yang telah mengarahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renja Perubahan yang diharapkan sesuai dengan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Semoga referensi Renja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Watampone, 15 Juli 2024

Kepala Dinas,



Drs. Andi Amran, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196811221989081001

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan Daerah pada umumnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan Daerah, karena Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit Organisasi Pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut: Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone 2025 :

- a. Berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan Pemerintahan Daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan Pemerintahan Daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone merupakan penjabaran dari program yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra). Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. Tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone beserta sasaran satuan kerja lain, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Bone. Sehingga tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Bone.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2025 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 ;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Daerah Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone;
24. Peraturan Bupati Bone Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone;
25. Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kab. Bone Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Bone Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone adalah sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana

program dan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus menformulasikan program dan kegiatan pelayanan perijinan di Kabupaten Bone dalam kurun waktu satu tahun;
2. Menyediakan sebuah dokumen yang strategik dan Komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di bidang pelayanan perijinan yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Bone.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun – tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan / atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Pokok – pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM,

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu h;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK,SPM dan SDGs (suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah – kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut
4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah beserta nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Untuk Mengukur Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone selama tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2023

Anggaran Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dengan APBD (murni) sebesar Rp. 11.043.438.452 dan APBD (perubahan) sebesar Rp. 10.315.114.984 terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 94,05%. Dengan rincian realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Program / Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

NO	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (DPPA)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.921.469.184	Rp 8.384.803.561	94%	100%
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 9.780.000	Rp 9.030.000	92%	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 9.780.000	Rp 9.030.000	100%	92%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.615.108.849	Rp 3.341.222.365	100%	92%
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.615.108.849	Rp 3.341.222.365	100%	92%
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 37.990.000	Rp 34.850.000	100%	92%
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 17.500.000	Rp 17.360 .000	100%	99%
4	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 20.490.000	Rp 17.490.000	100%	85%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.147.237.010	Rp 1.130.151.504	100%	99%
IV	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 105.346.240	Rp 105.346.240	100%	100%
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 32.874.780	Rp 29.522.280	100%	90%
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 499.999.940	Rp 486.949.940	100%	97%
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 73.631.050	Rp 73.631.050	100%	100%
9	Penyediaan baan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100%	100%

NO	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (DPPA)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
10		Rp 13.200.000	Rp 13.200.000	100%	100%
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 382.185.000	Rp 381.501.994	103%	100%
12	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100%	100%
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.578.925.900	Rp 1.562.886.289	100%	99%
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 1.578.925.900	Rp 1.562.886.289	100%	99%
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.02.781.600	Rp 1.005.534.996	100%	98%
VI	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 120.000.000	Rp 117.536.243	100%	98%
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 906.781.600	Rp 887.998.753	100%	98%
16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.505.645.825	Rp 1.301.128.407	100%	86%
VII	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 123.043.900	Rp 122.739.967	100%	100%
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 33.540.000	Rp 33.540.000	100%	100%
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 1.349.061.925	Rp 144.848.440	100%	85%
B	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 394.921.000	Rp 337.346.900	100%	85%

NO	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (DPPA)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
VIII	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 94.921.000	Rp 337.346.900	143%	85%
20	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp 236.630.000	Rp 181.735.500	221%	77%
21	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Rp 125.016.000	Rp 124.736.400	100%	100%
22	Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Rp 33.275.000	Rp 30.875.000	80%	93%
C	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 21.915.500	Rp 21.307.500	1081%	97%
IX	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.762.500	Rp 8.362.500	100%	96%
23	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp 9.762.500	Rp 9.362.500	100%	96%
X	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp 12.153.000	Rp 11.945.000	100%	98%
24	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0%	0%

NO	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (DPPA)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
25	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Rp 12.153.000	Rp 11.945.000	100%	98%
D	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 610.913.000	Rp 608.702.696	300%	100%
XI	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 610.913.000	Rp 608.702.696	133%	100%
26	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Rp 6.799.000	Rp 6.715.000	0%	99%
27	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp 604.114.000	Rp 601.987.696	150%	100%
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 365.895.300	Rp 349.646.700	86%	96%
XII	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 365.896.300	Rp 349.646.700	66%	96%
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 56.532.000	Rp 55.485.000	80%	98%
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 239.144.300	Rp 232.71.700	240%	97%
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 70.220.000	Rp 61.445.000	785%	85%
TOTAL		Rp. 10.315.114.984	Rp. 9.701.807.357		94,05%

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024

Sedangkan untuk Tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2024 dengan usulan sebesar Rp. 6.166.085.949 terurai dalam 5 program, 12 kegiatan dan 30 sub kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.

Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone namun masih ada beberapa sarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan beberapa kegiatan.

Anggaran

Dengan adanya refocusing anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Sistim Informasi dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL)

Pada tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone bekerjasama dengan pihak ketiga telah membuat sebuah aplikasi Sistim Informasi dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL) yang dapat memudahkan dalam proses Pelayanan Perizinan. Permasalahan disini adalah kurang mampunya aparatur dalam mengaplikasikan sistem tersebut.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, ke depan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai.

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (persen)	100	100	100	100	100%	100%	100%
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu (persen)	100	100	100	100	100%	100%	100%
2.18.01.2.01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan (dokumen)	2	3	2	3	100%	2	100%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat waktu (persen)	100	100	100	100	100%	100%	100%
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi ASN (laporan)	14	14	14	14	100%	14	100%

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	100	100	100	100	100%	100%	100%
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas	1	1	1	1	100%	1	100%
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti (laporan)	1	1	1	1	50%	1	100%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor (persen)	100	100	100	100	100%	100%	100%
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor (laporan)	12	12	12	12	0%	12	100%
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (laporan)	4	4	4	4	0%	4	100%
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor (laporan)	12	12	12	12	0%	12	100%

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (laporan)	12	12	12	12	0%	12	100%
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan pembayaran Media Bahan Bacaan	12	12	12	12	100%	12	100%
		Jumlah Laporan pembayaran Media yang Menayangkan Iklan	36	12	12	12	100%	12	100%
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas (laporan)	170	82	170	104	61%	190	103%
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan pemeliharaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (laporan)	1	1	1	1	100%	1	100%
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	40	25	40	30	75%	40	100%
2.18.01.2.07.04	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Laporan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan (laporan)	1	1	1	1	100%	-	-

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Pengadaan Mebeleur (laporan)	1	1	1	1	100%	-	-
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (laporan)	1	1	1	15	100%	1	100%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100	100	100	100	100%	100%	100%
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon/WiFi dan TV Kabel (rekening)	24	24	24	24	100%	24	100%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	3	3	3	3	100%	3	100%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (persen)	100	100	100	100	100%	100%	100%

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan (laporan)	12	12	12	12	100%	12	100%
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (laporan)	12	12	12	12	100%	12	100%
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya (laporan)	1	1	1	1	100%	12	100%
2:18:04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase Ketepatan waktu penerbitan izin sesuai SOP (persen)	85	85	85	80	94%	90	100%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	7700	4944	7.700	8095	105%	11421	143%

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah laporan Izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau (laporan)	1800	1259	1.800	277	15%	4193	221%
		Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang disusun (dokumen)	1	1	1	1	100%	1	100%
		Jumlah laporan izin terbit yang diarsipkan (laporan)	7700	4944	7.700	8095	105%	11421	143%
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil Monev penyelegaraan perizinan (dokumen)	1	1	1	1	100%	1	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perizinan (dokumen)	1	1	1	1	100%	1	100%
		Jumlah Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100%	1	100%

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Laporan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	5	4	5	5	100%	4	80%
2:18:02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Presentase Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (persen)	18	57	18	782	4344%	227	1081%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Investor yang mendapatkan pemberian fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan (persen)	100	100	100	100	100%	100	100%
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen PERDA / Regulasi Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah (dokumen)	1	1	1	1	100%	1	100%
		Jumlah Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1	1	1	1	100%	1	100%

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Presentase wilayah Kabupaten Bone yang telah disusun kedalam peta potensi investasi (persen)	100	100	100	100	100%	100	100%
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan RUPM (dokumen)	1	1	1	1	100%	1	100%
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Peluang Investasi (dokumen)	1	1	1	1	100%	1	100%
2:18:03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase Peningkatan Jumlah Investor Penanaman Modal (persen)	15	117	15	77	7700%	60	300%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Investor Penanaman Modal (investor)	150	243	150	431	287%	265	133%
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	1	1	1	50%	0	0
		Jumlah Kegiatan Penerimaan misi Penanaman Modal	1	1	1	1	0%	2	200%

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kegiatan Pameran yang diikuti (laporan)	4	1	4	6	150%	6	150%
2:18:05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase Perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal (persen)	50	10	50	50	100%	56	86%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal (persen)	75	10	75	50	67%	56	66%
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan Perusahaan yang dipantau (laporan)	60	50	60	50	100%	56	80%
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan kegiatan pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal (laporan)	35	22	35	240	686%	240	240%
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Perusahaan yang diawasi (laporan)	15	10	15	187	1247%	157	785%

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2:18:06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase ketersediaan Data dan Informasi perizinan dan Non Perizinani (persen)	85	70	85	85	100%	0	0
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Lembaga lainnya yang terintegrasi dengan sistem informasi perizinan berusaha	1	1	1	1	100%	0	0
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang dikelola/dikembangkan/dibangun	1	1	1	1	100%	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penggabungan antara penyelenggara PTSP yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dengan Kantor Promosi Penanaman Modal (KPPM). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Bone Nomor 33 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dalam hal melaksanakan pelayanannya senantiasa berpedoman pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur, dengan tujuan adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, serta sebagai panduan bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya. Izin yang dikelola oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone sejak terbitnya Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2015 tentang penyederhaan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bone adalah sebanyak 17 izin + 1 izin Penanaman Modal.

Proses pelayanan perizinan dapat dilakukan secara paralel/simultan dengan adanya Tim Teknis yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan perizinan yang terkoordinasi, terarah, dan tepat sasaran. Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) terdiri dari Unsur SKPD Teknis terkait perizinan dan juga Unsur DPMPSTSP yang bertugas antara lain:

1. Memberikan kajian teknis terhadap pemrosesan perizinan;
2. Memberikan rekomendasi disetujui / ditolak untuk diterbitkan izin.
3. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan.

Sejak Tahun 2016 proses pelayanan perizinan pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menggunakan aplikasi on line melalui website ***www.bp2t_bone.id*** dan ditahun 2017 berubah nama menjadi ***www.dpmptsp.bone.go.id*** dan sms gateway dimana dalam aplikasi ini masyarakat dapat mengakses informasi tentang kegiatan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pendaftaran izin secara online, perhitungan retribusi IMB, tracking dokumen serta masyarakat dapat mendownload permohonan izin.

Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone didasarkan pada *review* pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.

Tabel 2.1.3
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

NO	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	IKK	Target Renstra			Realisasi Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP		BB	BB	A	B	BB	A
	Indeks Kepuasan Masyarakat		A	A	A	B (83,49)	A (88,563)	A (89,633)
	Presentase Peningkatan Investasi (persen)		15	18	21	57%	680%	227%
	Nilai PMA/PMDN (Milyar)		300	350	400	278.269.682.501	2.300.998.887.802	908.599.254.656
		PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	1	1	1	1	1	1
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	1	1	1	1	1	1
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/inse ntif penanaman modal	1	1	1	1	1	1
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	1	2	1	1	1
		Kegiatan pameran penanaman modal	4	4	4	4	6	6
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1	1	1	1	1	2
		Konsultasi perizinan dan non perizinan	1	1	1	1	2	4

NO	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	IKK	Target Renstra			Realisasi Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		penanaman modal						
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	7500	7700	8000	4944	8095	11.157
		Laporan realisasi penanaman modal	300 M	350 M	400 M	278.269.682.501	2.300.998.887.802	908.599.254.656
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	25	35	50	25	240	220
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN				12	187	80
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota				3	1	2

2.3 Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Isu Internal

1. Tugas Pokok dan Fungsi

- Inovasi-inovasi dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
- Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal untuk pencapaian terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bone;
- Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;

2. Sumber Daya Aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

3. Sarana dan Prasarana

- Mengembangkan Teknologi Informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan pelayanan yang lebih baik dalam menunjang peningkatan Iklim Investasi.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
- Pemeliharaan Sistem Informasi dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL) dan aplikasi MPP Digital dengan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur yang bertindak sebagai admin maupun operator agar terdapat ketepatan, kesesuaian dan keseragaman dalam pengisian dan penyusunan dengan peraturan yang ada dan berlaku.

4. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Bone menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarnya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program.

b. Isu Eksternal

1). Globalisasi

Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual).

2). Peraturan Perundang-Undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan *good governance* dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya

penyelenggaraan *good governance* dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

- ♦ Belum Tersedianya database investasi yang akurat dari setiap sektor
- ♦ Belum tersosialisasikannya regulasi Insentif Penanaman Modal secara menyeluruh
- ♦ Masih kurangnya dukungan kebijakan maupun regulasi terhadap kegiatan promosi guna mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bone;
- ♦ Masih rendahnya kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan pengembangan Investasi dan Penanaman Modal;
- ♦ Belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan penanaman modal;
- ♦ Secara kuantitas maupun kualitas kerjasama dalam pengembangan investasi dan penanaman modal masih belum sesuai harapan;
- ♦ Terbatasnya kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
- ♦ Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan surat izin usaha

Dampak

Belum tersosialisasikannya regulasi Insentif Penanaman Modal secara menyeluruh sangat berpengaruh terhadap peningkatan Iklim Investasi sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga koordinasi dengan pihak terkait harus selalu dijalankan dan dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan juga Perangkat Daerah baik vertikal maupun horizontal. Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini juga mengikuti apa yang tertuang di dalam dokumen perencanaan yang telah dikeluarkan sebagai produk dari Bappeda sebagai institusi perencanaan.

Tantangan dan Peluang

Tantangan

1. Kebutuhan akan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik dan transparan sebagai perwujudan *good governance*.

2. Belum adanya data peta investasi dan perizinan yang akurat.

Peluang

1. Pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan;
2. Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
3. Adanya Sistem Informasi Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL);
4. Penyelenggaraan perizinan Satu Pintu di Mal Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun melalui MPP Digital;
5. Potensi wilayah yang memadai untuk mendatangkan investor;

Berdasarkan permasalahan diatas, terdapat isu-isu strategis yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan harus segera ditindaklanjuti yaitu ;

1. Data potensi investasi yang tidak lengkap.
2. Perlu diadakan pelatihan – pelatihan bagi tenaga teknis / bidang pelayanan publik secara terprogram / terencana.
3. Perlunya fungsi pengawasan langsung yang lebih baik terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
4. Perlunya sosialisasi secara terpadu untuk menanamkan kesadaran bagi masyarakat tentang aturan / prosedur yang berlaku
5. Perlu ditingkatkannya sarana prasarana terutama yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan perijinan kepada masyarakat serta pelaksanaan kegiatan kedinasan secara umum
6. Area Gedung/Kantor harus luas, nyaman dan aman
7. Di tambahnya staf bagi tenaga teknis / bidang pelayanan publik secara terprogram / terencana.

Dalam menyikapi isu-isu diatas, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu menempuh beberapa hal diantaranya yaitu melaksanakan pelatihan bagi aparatur dalam hal penggunaan aplikasi perizinan baik itu SIMPEL, MPP Digital, dan SICANTIK, melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan tentang perizinan dan penanaman modal serta pembuatan RUPM dan Video Profil Potensi investasi Kabupaten Bone serta keikutsertaan dalam kegiatan Promosi investasi melalui kegiatan South Sulawesi Investment Challenge (SSIC).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bone	Presentase program teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%)	100%	24.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bone	Presentase program teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%)	100%	24.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja	100%	24.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja	100%	24.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bone	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	23.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bone	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	23.000.000	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bone	Jumlah berita acara hasil forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen	1 berita acara	1.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bone	Jumlah berita acara hasil forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen	1 berita acara	1.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			perencanaan perangkat daerah					perencanaan perangkat daerah			
	Admistrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bone	Presentase ketersediaan dokumen pelaksanaan administrasi keuangan periodik perangkat daerah presentase ketersediaan dokumen pelaksanaan administrasi umum pada perangkat daerah	100%	2.954.215.949	Admistrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bone	Presentase ketersediaan dokumen pelaksanaan administrasi keuangan periodik perangkat daerah presentase ketersediaan dokumen pelaksanaan administrasi umum pada perangkat daerah	100%	2.954.215.949	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Bone	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	322 orang/ bulan	2.954.215.949	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Bone	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	322 orang/ bulan	2.954.215.949	
	Admistrasi umum perangkat daerah	Kab. Bone	Persentase ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	700.000.000	Admistrasi umum perangkat daerah	Kab. Bone	Persentase ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	700.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Bone	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	54.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Bone	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	54.000.000	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Bone	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	20.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Bone	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	20.000.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Bone	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	259.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Bone	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	259.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Bone	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	58.800.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Bone	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	58.800.000	
	Penyediaan barang bacaan dan pengaturan perundang undangan	Kab. Bone	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12 dokuman	13.200.000	Penyediaan barang bacaan dan pengaturan perundang undangan	Kab. Bone	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12 dokuman	13.200.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Bone	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	250 laporan	245.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Bone	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	250 laporan	245.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kab. Bone	Jumlah laporan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	50.000.000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kab. Bone	Jumlah laporan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	50.000.000	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bone	Presentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan pada perangkat daerah	100%	660.000.000	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bone	Presentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan pada perangkat daerah	100%	660.000.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Bone	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	150.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Bone	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	150.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Bone	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	61 laporan	510.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Bone	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	61 laporan	510.000.000	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bone	Presentase ketersediaan barang milik daerah dalam	100%	290.000.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bone	Presentase ketersediaan barang milik daerah dalam	100%	290.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kondisi baik pada perangkatv daerah					kondisi baik pada perangkatv daerah			
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Bone	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 unit	110.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Bone	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 unit	110.000.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Bone	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 unit	80.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Bone	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 unit	80.000.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Bone	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	100.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Bone	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	100.000.000	
	Program pengembangan iklim penanaman modal	Kab. Bone	Presentase capaian nilai realisasi investasi penanaman modal	90%	48.000.000	Program pengembangan iklim penanaman modal	Kab. Bone	Presentase capaian nilai realisasi investasi penanaman modal	90%	48.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Kab. Bone	Presentase investor yang mendapatkan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan	100%	19.000.000	Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Kab. Bone	Presentase investor yang mendapatkan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan	100%	19.000.000	
	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kab. Bone	Jumlah persatuan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	19.000.000	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kab. Bone	Jumlah persatuan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	19.000.000	
	Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/bone	Kab. Bone	Presentase wilayah kabupaten bone yang telah disusun ke dalam peta potensi wilayah	100%	29.000.000	Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/bone	Kab. Bone	Presentase wilayah kabupaten bone yang telah disusun ke dalam peta potensi wilayah	100%	29.000.000	
	Penyusunan wilayah umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	Kab. Bone	Jumlah peraturan daerah (perda) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	1 dokumen	14.500.000	Penyusunan wilayah umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	Kab. Bone	Jumlah peraturan daerah (perda) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	1 dokumen	14.500.000	
	Penyusunan peta potensi investasi kabupaten/kota	Kab. Bone	Jumlah dokumen peta potensi ivestasi kabupaten/bone	1 dokumen	14.500.000	Penyusunan peta potensi investasi kabupaten/kota	Kab. Bone	Jumlah dokumen peta potensi ivestasi kabupaten/bone	1 dokumen	14.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program promosi penanaman modal	Kab. Bone	Presentase peningkatan jumlah investor penanaman modal	100%	119.000.000	Program promosi penanaman modal	Kab. Bone	Presentase peningkatan jumlah investor penanaman modal	100%	119.000.000	
	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/bone	Kab. Bone	Jumlah investor penanaman modal	200 Investor	119.000.000	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/bone	Kab. Bone	Jumlah investor penanaman modal	200 Investor	119.000.000	
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/bone	Kab. Bone	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/bone	6 dokumen	100.000.000	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/bone	Kab. Bone	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/bone	6 dokumen	100.000.000	
	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/bone	Kab. Bone	Jumlah dokumen sterategi promosi penanaman modal kab/bone	1 dokumen	19.000.000	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/bone	Kab. Bone	Jumlah dokumen sterategi promosi penanaman modal kab/bone	1 dokumen	19.000.000	
	Program pelayanan penanaman modal	Kab. Bone	Presentase layanan perizinan dan non perizinan yang terlaksana sesuai sop yang berlaku	80%	159.000.000	Program pelayanan penanaman modal	Kab. Bone	Presentase layanan perizinan dan non perizinan yang terlaksana sesuai sop yang berlaku	80%	159.000.000	
	Penyediaan pelayanan perizinan berusaha	Kab. Bone	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan	2600 pelaku usaha	115.000.000	Penyediaan pelayanan perizinan berusaha	Kab. Bone	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan	2600 pelaku usaha	115.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik		pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik			melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik		pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik			
	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis reziko	Kab. Bone	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis reziko terintegrasi secara elektronik	40 pelaku usaha	25.000.000	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis reziko	Kab. Bone	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis reziko terintegrasi secara elektronik	40 pelaku usaha	25.000.000	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Bone	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantuan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinaan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Bone	2100 kegiatan usaha	19.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Bone	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantuan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinaan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Bone	2100 kegiatan usaha	19.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha					bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha			
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kab. Bone	Presentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal	55%	592.730.000	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kab. Bone	Presentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal	55%	592.730.000	
	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/bone	Kab. Bone	Presentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	60%	592.730.000	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/bone	Kab. Bone	Presentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	60%	592.730.000	
	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kab. Bone	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	100 kegiatan usaha	92.750.000	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kab. Bone	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	100 kegiatan usaha	92.750.000	
	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Kab. Bone	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan	240 pelaku usaha	402.500.000	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Kab. Bone	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan	240 pelaku usaha	402.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko					teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko			
	Pengawasan penanaman modal	Kab. Bone	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisis dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	100 kegiatan usaha	97.480.000	Pengawasan penanaman modal	Kab. Bone	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisis dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	100 kegiatan usaha	97.480.000	

2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone belum secara langsung terlibat dengan kegiatan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya selaku stakeholder eksternal pemerintahan daerah. Oleh karena itu, hingga saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kab. Bone belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholder eksternal untuk dimasukkan dalam rencana kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone yaitu Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas Penanaman Modal, Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Insentif yang dimaksud adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada Penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah dan Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal, pengendalian penanaman modal adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam rangka mendukung prioritas nasional ketiga sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif maka diperlukan upaya untuk menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Di Bidang Penanaman Modal Hasil Pemetaan, Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota peningkatan penyelenggaraan penanaman modal. Hal tersebut juga telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal, selanjutnya dalam Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun Tahun 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup tsb, termasuk pendidikan,

pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki tujuan :

- Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Penanaman Modal yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki indikator tujuan yaitu :

- Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP
- Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP
- Presentase peningkatan investasi di Kabupaten Bone

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yaitu:

- Terwujudnya penguatan akuntabilitas kinerja DPMPTSP
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- Meningkatnya daya Tarik investasi / penanaman modal di Kabupaten Bone

Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki indikator tujuan yaitu:

- Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP
- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Nilai investasi PMDN / PMA

Tabel 3.1.1
Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
I	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Penanaman Modal yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP
II			Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP
III			Presentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Bone
IV		Terwujudnya penguatan akuntabilitas kinerja DPMPTSP	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP
V		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
VI		Meningkatnya daya Tarik investasi / penanaman modal di Kabupaten Bone	Nilai investasi PMDN / PMA

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk implementasikan program dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi misi Kabupaten Bone, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih menitikberatkan pada hal peningkatan promosi dan pengembangan potensi dan produk unggulan daerah

melalui program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, serta Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yang akan diselenggarakan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Program Utama

- 1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 2. Program Promosi Penanaman Modal
- 3. Program Pelayanan Penanaman Modal
- 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Penunjang

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.2

Uraian Sub Kegiatan, Kegiatan dan Program Prioritas Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

			Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
			Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
			Pengawasan Penanaman Modal

Tabel 3.1.3
Uraian Sub Kegiatan, Kegiatan dan Program Penunjang Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	PROGRAM PENUNJANG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

NO	PROGRAM PENUNJANG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Jumlah Rekening Telepon/WiFi dan TV Kabel	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Tahun 2023 merencanakan 5 (lima) Program serta 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
- Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Peneyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Peneyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD;

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota;

- Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal

b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;

- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

h. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL :

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota

i. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL :

a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
- Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- Pengawasan Penanaman Modal

j. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
- Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

Secara lengkap, rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025, beserta kebutuhan dana indikatif dan sumbernya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						5.546.945.949,00							6.350.326.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.546.945.949,00							6.350.326.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						5.546.945.949,00							6.350.326.000,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.628.215.949,00						-	4.872.501.000,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	24.000.000,00			-	01.Peningkat an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMTSP	100 Persen	23.340.070,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen			4 Dokumen	23.000.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01.Peningkat an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMTSP	4 Dokumen	23.340.070,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah Presentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen 85 Persen	2.954.215.949,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMPTSP	100 Persen	3.637.518.379,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1224 Orang/bulan			300 Orang/bulan	2.954.215.949,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMPTSP	408 Orang/bulan	3.637.518.379,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	700.000.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMPTSP	100 Persen	549.355.051,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	54.000.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMPTSP	4 Paket	81.497.551,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket			12 Paket	20.000.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMPTSP	1 Paket	14.177.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			12 Paket	259.000.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMTSP	3 Paket	170.130.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket			0 Paket	58.800.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMTSP	2 Paket	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	13.200.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMTSP	12 Dokumen	34.026.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540 Laporan			250 Laporan	245.000.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMTSP	275 Laporan	226.840.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMTSP	1 Dokumen	22.684.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90 Persen			85 Persen	0,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMTSP	90 Persen	55.125.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46 Unit			10 Unit	0,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMPTSP	10 Unit	55.125.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	660.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMPTSP	100 Persen	385.875.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN REBOISASI (DR)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMPTSP	12 Laporan	110.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	183 Laporan			61 Laporan	510.000.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMPTSP	61 Laporan	275.625.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	290.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMPTSP	100 Persen	221.287.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	36 Unit			12 Unit	110.000.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMPTSP	12 Unit	83.475.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit			12 Unit	80.000.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMPTSP	12 Unit	27.562.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Aparat DPMPTSP	1 Unit	110.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Presentase Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	90 Persen			90 Persen	48.000.000,00						90 Persen	29.735.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Investor yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan	100 Persen			100 Persen	19.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelaku Usaha	100 Persen	7.835.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen			1 Dokumen	19.000.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelaku Usaha	1 Dokumen	7.835.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Presentase Wilayah Kabupaten Bone yangh telah disusun kedalam Peta Potensi Investasi	100 Persen			100 Persen	29.000.000,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelaku Usaha	100 Persen	21.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	14.500.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelaku Usaha	1 Dokumen	10.950.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	14.500.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelaku Usaha	1 Dokumen	10.950.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Presentase Peningkatan Jumlah Investor Penanaman Modal</i>	100 %			100 %	119.000.000,00						100 %	364.995.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Investor Penanaman Modal</i>	600 Investor			200 Investor	119.000.000,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelaku Usaha	250 Investor	364.995.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>	18 Dokumen			6 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelaku Usaha	6 Dokumen	329.122.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	19.000.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelaku Usaha	1 Dokumen	35.872.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlaksana Sesuai SOP yang Berlaku	80 Persen			80 Persen	159.000.000,00						80 Persen	481.360.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	20000 Izin			6500 Izin	159.000.000,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelaku Usaha	7000 Izin	481.360.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	7800 Pelaku Usaha			2600 Pelaku Usaha	115.000.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelaku Usaha	2700 Pelaku Usaha	220.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	120 Pelaku Usaha			40 Pelaku Usaha	25.000.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	51.390.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>	6300 Kegiatan Usaha			2100 Kegiatan Usaha	19.000.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelaku Usaha	2200 Kegiatan Usaha	209.470.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Presentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Penanaman Modal</i>	55 %			55 %	592.730.000,00						55 %	601.735.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM</i>	175 Persen			60 Persen	592.730.000,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelaku Usaha	65 Persen	601.735.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	300 Kegiatan Usaha.			100 Kegiatan Usaha.	92.750.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berdasarkan Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha.	76.797.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha															
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	720 Pelaku Usaha			240 Pelaku Usaha	402.500.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berdasarkan Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	422.625.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal															
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	300 Kegiatan Usaha			100 Kegiatan Usaha	97.480.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berdasarkan Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	102.313.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		J U M L A H							5.546.945.949,00							6.350.326.000,00	

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Koordinat dan Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025, secara sinergitas dan terintegrasi. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Koordinat dan Sekretariat, Bagian Perencanaan dan Program menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Renja Tahun 2025.
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2025, Renja Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Koordinat dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas, melalui Bagian Umum Sekretariat.
4. Secara proaktif, Bagian Perencanaan dan Program, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan Renja Tahun 2025 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing Koordinat dan Sekretariat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas.
5. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap Koordinat dan Sekretariat wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2025, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sub Bagian Umum.
6. Renja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kegiatan perencanaan dan penyusunan Kebijakan Penanaman Modal dengan indikator penyusunan dokumen regulasi pemberian insentif / kemudahan kepada penanam modal dan

kegiatan pengembangan system informasi penanaman modal merupakan dua kegiatan prioritas pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Tahun 2025, dalam kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai investasi dan mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien transparan dan akuntabel.